

DAMPAK RELOKASI TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KULINER PRATISTHA HARSA PURWOKERTO

Rochmat Aldy Purnomo¹

¹Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
rochmataldy93@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze aspects of the social environment of street vendors between before and after relocating to Pratistha Harsa. Collecting data using the techniques of interview, observation and literature. The respondents were selected is Pratistha Harsa Chief Manager, Chairman of the Society Pratistha Harsha, traders culinary Pratistha Harsa. The population of merchants who relocated to Pratistha Harsa number of 65 traders and a sample of 40 traders. Selection of the sample using simple random sampling. This study uses Wilcoxon analysis test. The results showed that an increase in the average of the perception of traders about the safety, cleanliness, lighting and ease of relocation time before and after the relocation.

Keyword: *five feets relocation, informal sector, pratistha harsa.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek lingkungan sosial dari pedagang kaki lima antara sebelum dan sesudah relokasi ke Pratistha Harsa. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Adapun responden yang dipilih yaitu Kepala Pengelola Pratistha Harsa, Ketua Paguyuban Pratistha Harsa, pedagang kuliner Pratistha Harsa. Populasi pedagang yang direlokasi ke Pratistha Harsa sejumlah 65 orang pedagang dan sampel sebanyak 40 pedagang. Pemilihan sampel menggunakan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis Wilcoxon test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan rata-rata dari persepsi pedagang tentang keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan saat sebelum relokasi dan sesudah relokasi.

Kata Kunci : relokasi pedagang kaki lima, sektor informal, pratistha harsa

PENDAHULUAN

Rencana tata ruang wilayah erat kaitannya dengan pembangunan daerah yang mencakup seluruh sektor suatu daerah dan memiliki potensi untuk dibangun, baik itu sektor formal maupun informal. Badan Pusat

Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri, meskipun mereka

menghadapi kendala baik modal maupun sumberdaya fisik dan manusia. Sektor informal merupakan urat nadi kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil, terutama di kota. Oleh karena itu, sektor ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut rakyat miskin tetapi juga memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan formal. Dengan demikian, sektor ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan rakyat kecil.

Pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan dari perekonomian di Indonesia. Sebagian dari para pedagang kaki lima melaksanakan pekerjaannya sesudah jam kerja (ada yang pagi hari bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja di lingkungan perusahaan swasta) atau pada waktu senggang. Ada yang melaksanakan aktivitas sebagai pedagang kaki lima untuk mencapai pendapatan tambahan, tetapi ada pula yang mengandalkan hidup mereka pada kegiatan tersebut.

Seiring berjalannya waktu para pedagang kaki lima ini tetap ada hingga sekarang. Para pedagang ini dianggap mengganggu para pengguna jalan karena pedagang telah

memakan ruas jalan dalam mengelarkan dagangannya, khususnya di Kota Purwokerto. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima sering menggunakan ruang publik, yang seharusnya bukan untuk berjualan tetapi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Para pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, sehingga lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari (pengamatan peneliti, 13 April 2015).

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan suatu permasalahan prioritas di Kota Purwokerto. Pertumbuhan pedagang kaki lima dari tahun ketahun semakin pesat dan tidak terkendali. Jumlah pedagang kaki lima di seluruh kota Purwokerto pada tahun 2009 hanya terdapat 769 PKL, dan tahun 2014 meningkat menjadi 998 PKL. Meskipun sudah dilakukan penertiban tapi hal ini tidak membuat pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang bahu jalan berkurang secara signifikan (Dinperindagkop Kabupaten Banyumas, 2015).

Saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah membuat peraturan untuk mengatur pedagang kaki lima,

yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada Pasal 6 berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Pada lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL dalam melaksanakan kegiatannya;
3. Bupati dalam menetapkan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan akan memperhatikan saran dan masukan dari Pimpinan DPRD.

Kebijakan tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan PKL. Pada Pasal 4, setiap PKL berhak :

1. Melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan Surat Penempatan PKL;
2. Memperoleh pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan PKL menjadi kegiatan perekonomian sektor formal;

3. Memperoleh fasilitas dalam rangka pemberdayaan PKL.

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada PKL ialah menerapkan kebijakan tentang relokasi atau penempatan yang tepat untuk pedagang kaki lima yaitu, dengan cara menyediakan lahan strategis untuk pemasaran barang dagangan para pedagang kaki lima tersebut. Dalam hal ini kepentingan pedagang kaki lima dapat terpenuhi dan tentunya pemerintah dapat mempertimbangkan juga bahwa lahan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota sehingga diharapkan kepentingan pemerintah dan pedagang kaki lima dapat terpenuhi sehingga dapat tercipta suatu format penyelesaian kebijakan yang berarti kebersihan, keindahan dan kerapihan kota dapat terwujud, kesejahteraan rakyat pedagang kaki lima pun dapat terwujud.

Sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku pedagang informal di Banyumas khususnya Kota Purwokerto, dan agar lebih bergairah dalam berusaha dan meningkatkan produksinya sehingga akan menambah pendapatannya, maka

pemerintah membuat strategi relokasi pedagang. Salah satunya ialah relokasi para pedagang informal dari beberapa tempat seperti alun-alun Purwokerto, trotoar Pereng dan Jalan Jenderal Soedirman ke Pratistha Harsa.

Pratistha Harsa terletak di sebelah barat alun-alun Purwokerto, kurang lebih 100 meter dari alun-alun. Pada pemerintahan Bupati Drs. Mardjoko, M.M. periode 2008-2013. Pratistha Harsa didirikan untuk mengganti sementara para penjual makanan yang berada di alun-alun Purwokerto, karena ada renovasi jangka panjang alun-alun pada tahun 2009. Namun pada pemerintahan Ir. Achmad Husein, tahun 2013, Pratistha Harsa semakin dikembangkan dengan menambah bangunan baru untuk produk UKM. Pada tahun 2014, Bupati Banyumas secara resmi membuat peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil Menengah Pratistha Harsa.

Relokasi pedagang ke Pratistha Harsa memiliki tujuan diantaranya dapat meningkatkan kualitas pelayanan pedagang. Selain itu, diharapkan dapat membantu pedagang di Pratistha Harsa agar dapat mengembangkan usahanya

dan meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Pratistha Harsa juga merupakan salah satu tempat yang sangat strategis, karena berada di pusat kota. Para pedagang yang berjualan di tempat tersebut dapat memasarkan produknya dengan lebih optimis. Namun, terdapat persaingan antar pusat kuliner di Kota Purwokerto. Hal ini mengakibatkan adanya persaingan antar pusat kuliner, dan Pratistha Harsa membutuhkan strategi pengembangan agar semakin dikenal masyarakat Purwokerto dan sekitarnya.

Pada dasarnya kegiatan relokasi memiliki dampak positif dan negatif baik dilihat dari sisi lingkungan sosial yaitu persepsi keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan terhadap para pedagang di Pratistha Harsa dan juga bagi pelaku ekonomi lainnya (konsumen dan pemerintah). Mengingat berbagai kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan relokasi pedagang di Pratistha Harsa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto.

KAJIAN LITERATUR

Relokasi bukan hanya suatu proses pemindahan orang-orang dari suatu lokasi, akan tetapi juga memindahkan perilaku dan identitas dari pedagang tersebut. Dampak lingkungan sosial adalah perubahan dalam kondisi kehidupan orang-orang yang terjadi bersama dengan suatu kebijakan yang baru, program atau proyek.

Permasalahan inti dari relokasi adalah kehilangan masyarakat atas mata pencaharian serta penurunan kemampuan potensial mereka akibat dari pemindahan tersebut. Ketika suatu pedagang terpaksa untuk pindah maka sistem produksi yang sudah ada menjadi berkurang. Banyak aset pendapatan yang hilang seperti hilangnya pelanggan karena berpindahnya tempat dagang, adaptasi terhadap pesaing baru, dan berkuat pada peraturan-peraturan baru.

Selain hal itu, kita dapat melihat dampak negatif lain yang mungkin timbul bagi pedagang yang direlokasi, antara lain :

a. Kehidupan pedagang dapat terkena akibat atau dampak yang mengakibatkan penderitaan. Mata rantai antara produsen dan konsumen dapat terputus,

b. Jaringan sosial informal yang merupakan bagian dari sistem pemeliharaan kehidupan sehari-hari menjadi rusak,

c. Organisasi setempat dan perkumpulan formal dan informal lenyap karena berubahnya anggota mereka. Masyarakat dan otoritas tradisional dapat kehilangan pemimpin mereka,

Menurut Wet (2002), hasil yang diharapkan dari proses relokasi adalah agar kondisi masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelum terjadi relokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut meliputi: tingkat pendapatan, keberagaman sumber pendapatan, status dan jaminan di lokasi yang baru, akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar. Ada 5 kategori nilai-nilai yang didapatkan oleh pedagang yang direlokasi, antara lain:

- a. Kemakmuran (*wealth*) yang berisikan banyak faktor yang berkaitan dengan capaian ekonom individu. faktor-faktor tersebut terdapat dalam berbagai bentuk, antara lain upah yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih baik, biaya hidup yang rendah, retribusi yang efisien, stabilitas perdagangan,
- b. Kenyamanan (*comfort*), dapat dilihat sebagai tujuan untuk mencapai kondisi hidup maupun

- yang lebih nyaman, termasuk di dalamnya adalah tempat dagang yang lebih baik, lingkungan tempat dagang yang menyenangkan, teman kerja yang lebih baik, keadaan tempat yang lebih sehat,
- c. Stimulasi, berkaitan dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti adanya paguyuban baru dan membentuk berbagai kegiatan seperti rekreasi dimana sebagai bentuk kegiatan yang yang dapat mengurangi kejenuhan dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru,
 - d. Afiliasi, mengacu pada nilai seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam hubungannya dengan relokasi tersebut. Berafiliasi dengan pihak lain dapat pula menjadi faktor yang memfasilitasi pencapaian tujuan personal dalam migrasi,
 - e. Moralitas, terkait dengan nilai serta sistem keyakinan yang menentukan cara hidup yang baik maupun buruk, seperti norma agama. Nilai moral dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang maupun masyarakat, tergantung tingkat komitmen dari individu.

HIPOTESIS

Salah satu konsep peningkatan dan pengembangan sektor informal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas ialah program relokasi PKL. Relokasi pedagang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan suasana yang lebih nyaman kepada para pedagang walaupun harus mengeluarkan biaya retribusi yang lebih besar dibandingkan berjualan lokasi sebelumnya. Dengan biaya retribusi tersebut,

pedagang juga sudah mendapatkan keamanan yang lebih baik. Pada sisi lingkungan sosial, pedagang diharapkan dapat merasa lebih aman, bersih mudah dan pencahayaan lebih terang. Oleh karena itu, dapat dijabarkan dalam bentuk hipotesis, bahwa :

- 1) H_0 : Tidak Terdapat perbedaan persepsi dari aspek lingkungan sosial pedagang sebelum dan sesudah relokasi ke kawasan Pratistha Harsa.
- 2) H_a : Terdapat perbedaan persepsi dari aspek lingkungan sosial pedagang sebelum dan sesudah relokasi ke kawasan Pratistha Harsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara dan kuesioner) dan sekunder (menelaah catatan, referensi maupun data yang terkait dengan penelitian). Peneliti menganalisis persepsi keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan terhadap para pedagang di Pratistha Harsa antara sebelum dan sesudah relokasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *analisis Wilcoxon*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu alasan pemerintah Kabupaten Banyumas mengadakan relokasi ialah memberikan keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan yang lebih baik bagi para pedagang. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pedagang informal tidak menolak ketika direlokasi ke Pratistha Harsa. Hasil uji Wilcoxon pada keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan dengan metode SPSS dapat dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Analisis Wilcoxon Pada Lingkungan Sosial Pedagang Kuliner Pratistha Harsa

No	Variabel	Rata-rata		Z-value
		Sebelum	Sesudah	
1	Keamanan	5,63	7,35	4,918
2	Kebersihan	5,75	8,00	5,501
3	Penerangan	6,15	7,70	5,449
4	Kemudahan	5,80	7,93	5,209

Sumber : data primer, diolah.

Dari Tabel Analisis Wilcoxon Pada Lingkungan Sosial Pedagang Kuliner Pratistha Harsa dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan rata-rata dari persepsi pedagang tentang keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan antara sebelum dan sesudah relokasi. Berdasarkan hasil dari perhitungan *Wilcoxon Signed Rank Test*, maka nilai Z yang didapat pada variabel keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan bernilai positif dengan *Probability of Error* sebesar 0,000 di mana kurang dari batas kritis penelitian yaitu 0,05 sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H_a atau yang berarti terdapat perbedaan persepsi keamanan, kebersihan, penerangan dan kemudahan dari pedagang antara sebelum relokasi dan sesudah relokasi.

Pembahasan

Pada prinsipnya, sektor informal merupakan katup pengaman bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk masuk kedalam sektor formal. Sektor informal seperti pedagang kaki lima menjadi lahan untuk mencari pendapatan bagi masyarakat yang tidak dapat masuk kedalam sektor formal dan juga sebagai penopang untuk kehidupan masyarakat, namun pedagang kaki lima sering menggunakan ruang publik, yang seharusnya bukan untuk berjualan tetapi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Para pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, sehingga lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas, dan mengaplikasikan peraturan daerah Kabupaten Banyumas No 4 tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dibuatlah sebuah langkah nyata yaitu adanya relokasi pedagang kaki lima dimana salah satu tempatnya ialah Pratistha Harsa. Relokasi pada suatu daerah selalu memberikan tantangan bagi pemerintah maupun pedagang yang hendak direlokasi baik sebelum

dilaksanakan maupun setelah dilaksanakan relokasi. Penelitian ini dilakukan karena ketertarikan peneliti mengenai dampak relokasi pada lingkungan sosial.

Dengan adanya relokasi dan peningkatan sarana, hal ini berpengaruh terhadap fasilitas Pratistha Harsa yang dinikmati pedagang menjadi lebih baik, seperti adanya los untuk tempat berjualan pedagang, penerangan, seksi keamanan untuk mengamankan dagangan pedagang, akses jalan untuk memudahkan pedagang dalam menjangkau Pratistha Harsa serta adanya seksi kebersihan untuk tetap menjaga kebersihan Pratistha Harsa. Karena itulah, pedagang merasa lebih aman, bersih, terang dan mudah saat sesudah relokasi. Hal ini mendukung penelitian Heriyanto (2012) tentang dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di kawasan Simpanglima dan jalan pahlawan Kota Semarang, bahwa dengan adanya relokasi, akan berdampak positif pada segi sosial dan ekonomi serta meningkatkan hubungan sosial diantara pedagang.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian pada sisi persepsi lingkungan sosial pedagang yang diukur dari kemandirian, kebersihan, kemudahan dan

penerangan terdapat kenaikan setelah relokasi ke Pratistha Harsa. Pedagang merasa lebih aman, lebih mudah, lebih terang, dan lebih bersih. Hal ini akan lebih baik lagi apabila tercipta kerjasama dengan pemerintah untuk mengadakan pelatihan dalam hal mengembangkan kemampuan pedagang dengan tema pelatihan penjualan, penganggaran, pelatihan pembuatan produk makanan yang inovatif dan sebagainya. Dengan begitu pedagang dapat tetap menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat atau konsumen yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

- De Wet, Chris. 2002. *The Experience with Dams and Resettlement in Africa. World Commission on Dams*. South Africa : Cape Town.
- Dinperindagkop Kabupaten Banyumas 2015. Data Pedagang Pratistha Harsa. Arsip Daerah: Tidak Dipublikasikan.
- Heriyanto, Aji Wahyu. 2012. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*. Economics Development Analysis Journal : Vol.1, No.2.
- Prasetyo, Priyo. 2008. *Pengembangan Strategi Pemasaran Rumah Sakit Berdasarkan Analisis SWOT dan Matrik QSP (Studi Kasus di RSUD PKU Muhammadiyah Merden Banjarnegara)*. Tesis. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Riduwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : CV. ALFABETA.